



LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2023

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KALIMANTAN SELATAN
2023**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lakin) Tahunan 2023 merupakan laporan serangkaian kegiatan pelatihan beserta kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dalam rentang periode Triwulan IV Januari s.d. Desember Tahun 2023. Di periode tersebut BBPP Binuang sebagai UPT pelatihan pertanian BPPSDMP Kementan senantiasa berupaya untuk membangun konteks pelatihan yang didasari oleh relevansi *ter-up to date* seperti *smart farming*, *startup milenial*, *climate change*, *Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS)* dll dengan tata kelola yang luhur dan sistematis serta dapat menginspirasi semua *stakeholders* pertanian.

BBPP Binuang juga berkomitmen memfasilitasi pengembangan SDM Pertanian baik institusi, lembaga P4S, ataupun kelompok tani di regional Kalimantan, dengan produk inovatif dan ramah lingkungan seperti inovasi Biotron (*Biochar Three In One*) sekaligus mendukung Gerakan Tani Pro Organik dan ketahanan pangan nasional. Dengan kegiatan dan apresiasi yang telah dicapai di periode ini kami berharap kinerja yang akan datang dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja yang lebih baik. Besar harapan kami Laporan Kinerja BBPP Binuang Tahunan 2023 ini dapat memberikan gambaran kinerja Balai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binuang, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Joko Tri Harjanto, ST MMA

NIP. 197208312003121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum BBPP Binuang	4
C. Isu Strategis.....	16
D. Dukungan Anggaran	21
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	24
a. Visi	24
b. Misi	24
c. Tujuan	24
d. Sasaran Strategis	25
e. Kebijakan Strategis Tahun 2020 - 2024.....	26
f. Program Kegiatan.....	27
g. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	27
B. Perjanjian Kinerja.....	28
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	30
B. Capaian Kinerja Organisasi	30
C. Capain Perjanjian Kinerja.....	42
D. Capaian Kinerja Lainnya	43
E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	46
 BAB IV. PENUTUP	
 LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
1.	Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S Tahun 2023	12
2.	Anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023	22
3.	Perjanjian Kinerja BBPP Binuang Tahun 2023.....	29
4.	Capaian Indikator Pelatihan Triwulan IV Tahun 2023.....	31
5.	Pengolahan Data Kuisioner IKM BBPP Binuang	38
6.	Realisasi Kinerja BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023.....	40
7.	Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Binuang TA 2020 - 2023	42
8.	Realisasi PNPB BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023	44



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
1.	Struktur Organisasi BBPP Binuang	8
2.	Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan.....	9
3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
4.	Persentase Pagu Anggaran BBPP Binuang.....	23
5.	Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih	33
6.	Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih.....	34
7.	Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2022.....	41
8.	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPP Triwulan IV Tahun 2023	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada periode Tahun 2023 Kementerian Pertanian (Kementan) siap melaksanakan 4 program, yaitu: (i) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; (ii) nilai tambah dan daya saing industri; (iii) pendidikan dan pelatihan vokasi; dan (iv) dukungan manajemen. Demikian juga dengan BPPSDM Pertanian, siap melaksanakan beberapa program unggulan diantaranya: (i) Low-Cost Precision Farming; (ii) Genta Organik; (iii) Tani Akur; (iv) Pelatihan Sejuta Petani-Penyuluh; dan (v) Kostratani.

Dalam akselerasi ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, target Kementan untuk sejumlah komoditas pangan utama pada 2023 seperti beras mencapai 54,5 juta ton. Untuk komoditas lainnya, jagung ditargetkan mencapai angka 23,05 juta ton, kedelai 370.000 ton, bawang merah 1,71 juta ton, bawang putih 45.450 ton, dan cabai 2,93 juta ton.

Sedangkan dalam akselerasi program nilai tambah dan daya saing industri, di Tahun 2023 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah menggelar Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) volume delapan dengan tema "*Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Mengantisipasi El Nino*". Melalui pelatihan ini diharapkan peningkatan nilai tambah komoditas pertanian makin besar. Widyaiswara, dosen, guru, dan penyuluh pertanian dapat mengajarkan dan mendampingi petani dalam menghasilkan nilai tambah komoditas pertanian yang dihasilkan.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam akselerasi program pendidikan dan pelatihan vokasi,, Kementan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama tersebut dengan pemerintah Korea Selatan. MoU itu yakni, Project on Enhancing Millenial Farmer's Income by Adopting K-Smart Farm technologies in Indonesia. Salah satu bentuk kerja sama antara BPPSDMP dengan EPIS Korea adalah pelaksanaan Training K-Smart Farm di Korea pada 6-12 Agustus 2023, yang merupakan



undangan dari Enhancing Milenial Farmers Income by Adopting K-Smary Farm Technologies in Indonesia.

Selain program tersebut di atas yang telah berjalan Kementerian Pertanian (Kementan) juga fokus mempercepat langkah menuju swasembada pangan dengan berbagai strategi, salah satunya melalui gerakan percepatan Luas Tanam Tambah (LTT) tanam jagung di beberapa wilayah Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P optimistis akselerasi percepatan tanam jagung yang diselingi komoditas strategis lainnya, seperti tanaman kelapa, akan semakin mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian turun ke lapangan melakukan pendataan dan mempercepat persiapan kebutuhan masa tanam.

“Indonesia memiliki potensi luar biasa dengan lahan yang dapat kita garap, salah satunya lahan perkebunan berpotensi menjadi cpcl optimalisasi percepatan produksi padi dan jagung. Jadi padi dan jagung disinergikan dengan komoditas perkebunan. Fokus utama kita saat ini adalah meningkatkan produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) dengan lebih mudah,” kata Menteri Pertanian (11/11).

Demi wujudkan akselerasi peningkatan luas tanam dan produksi padi dan jagung untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Pertanian sigap lakukan identifikasi CPCL agar tercapai target secara tepat guna. Perluasan lahan tanam ini dilakukan sebagai kelanjutan dari program optimasi pemanfaatan lahan rawa yang pernah dilakukan Menteri Pertanian di masa kepemimpinannya di 2014-2019 lalu.

Menteri Pertanian menyampaikan, *“Saya harap kita bisa jaga komitmen tingkatkan produksi padi dan jagung di tahun 2024 guna menambah jumlah produksi komoditas pertanian Indonesia.”*

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhan) mengadakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh yang dikemas dalam agenda Ngobrol Asyik (Ngobras) volume 48 dengan tema UPSUS Peningkatan Produksi Padi dan Jagung yang diadakan selama dua hari pada 05 - 06 Desember 2023 secara virtual di AOR BPPSDMP Kementan.



Melalui arahannya Kepala BPPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan saat ini 10 negara sudah mengalami krisis pangan akibat dampak covid, climate change dan el nino bahkan negara myanmar vietnam yang merupakan negara produsen menahan beras mereka untuk ekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

“Solusi yang dilakukan dalam penanganan krisis pangan yaitu genjot produktivitas dan produksi padi jagung, adapun pengungkit produktivitas diantaranya alsintan, asuransi sebanyak 25%, peraturan perundangan 25% dan yang utama sumber daya manusia pertanian sebanyak 25%”, ujar Kabadan Prof. Dedi.

Kabadan menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas dan produksi pertanian diantaranya sarana prasarana pertanian tersedia seperti pupuk, benih, pestisida, irigasi dan asuransi. Selain itu, petani juga harus mengerti dan memahami informasi teknologi pertanian diantaranya dengan menggunakan varietas tinggi. Yang terpenting pastikan penyuluh pertanian mendampingi petani dalam implementasi teknologi pertanian, tegasnya kembali.

Sedang melalui program kerjasama edukasi pertanian untuk meningkatkan kapasitas SDM milenial melalui kerjasama kampus merdeka dan sekoloh/SMK, BBPP Binuang mengadakan program magang bagi mahasiswa dan siswa yang akan melakukan praktik kerja. Selama berada di BBPP Binuang mereka diberikan pelatihan berbagai keterampilan mulai dari memproduksi hasil pertanian, melakukan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan sampai pemasarannya. Mereka juga dikenalkan dan dilatih mengoperasikan berbagai alsintan yang ada di BBPP Binuang, di antaranya Alsintan untuk olah tanah baik traktor roda 4, traktor roda 2 maupun cultivator.

Untuk menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparatur) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2023, BBPP Binuang telah menumbuh kembangkan 158 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Selatan (37 lembaga), Kalimantan Barat (27 lembaga), Kalimantan Utara (16 lembaga), Kalimantan Tengah (40 lembaga) dan Kalimantan Timur (38 lembaga). Di Triwulan IV Tahun



2023 jumlah support bantuan operasional P4S sebanyak 8 lembaga dari target 8 lembaga.

Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan. Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Pelatihan teknis agribisnis, manajemen, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.

Demikian pula terhadap SDM aparatur bidang pertanian, pelaksanaan pelatihannya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai pelatihan teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa pelatihan), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metoda pelatihan, walaupun itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sasaran, sebagai tindak lanjutnya akan terus dikembangkan sehingga kedepan akan dimilikiya pilihan alternative model pelatihan yang dapat melengkapi dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinkronisasi program pusat dan daerah.

B. Kondisi Umum BBPP Binuang

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Permentan Nomor 106/ Permentan/ OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, mempunyai Tugas Pokok *“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”*.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:



- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama.
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian.
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur.
- e) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
- f) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- g) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian.
- h) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian.
- i) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian.
- j) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- k) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian.
- l) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- m) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- n) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian.
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.
- q) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis.
- r) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Binuang.
- s) Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan



Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

BBPP Binuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja eselon II-b dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Kepala Balai, melaksanakan tugas pimpinan balai :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dan dalam lingkup area kerja balai.
- Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- Meningkatkan tata kelola anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
- Meningkatkan Layanan BBPP Binuang.

Kepala Balai membawahi :

1) Kepala Bagian Umum :

- Meningkatkan kualitas layanan umum.
- Meningkatkan kepuasan publik atas layanan balai.
- Meningkatkan kepuasan internal layanan bagian umum.

Kepala Bagian Umum membawahi :

a. Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga :

- Melaksanakan layanan kepegawaian.
- Melaksanakan tugas manajerial subkelompok kepegawaian dan RT sesuai penugasan.

b. Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi :

- Melaksanakan kegiatan layanan perlengkapan dan instalasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan .
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial perlengkapan dan instalasi sesuai penugasan.

c. Sub Koordinator Keuangan :

- Melaksanakan kegiatan layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial keuangan sesuai penugasan.



2) Koordinator Bidang Program dan Evaluasi :

- Melaksanakan monitoring kinerja anggaran BBPP Binuang sesuai dengan LKE/rencana proyeksi.
- Melaksanakan kegiatan layanan program dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial sesuai penugasan.
- Melaksanakan peningkatan jumlah P4S dan peningkatan kelas klasifikasi P4S.

Koordinator Bidang Program dan Evaluasi membawahi :

a. Sub Koordinator Program dan Kerjasama :

- Melaksanakan program dan kerjasama balai, dokumen kehumasan dan publikasi
- Melaksanakan tugas manajerial program dan kerjasama sesuai penugasan

b. Sub Koordinator Evaluasi dan Laporan :

- Melaksanakan pemutakhiran data evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala.
- Melaksanakan dokumen layanan evaluasi dan pelaporan.
- Melaksanakan tugas manajerial evaluasi dan pelaporan sesuai penugasan.

3) Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan :

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.

Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan membawahi :

a. Sub Koordinator Pelatihan Aparatur :

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pelatihan aparatur.

b. Sub Koordinator Pelatihan Non Aparatur

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pelatihan non aparatur.

4) Jabatan Fungsional

a. Widyaiswara

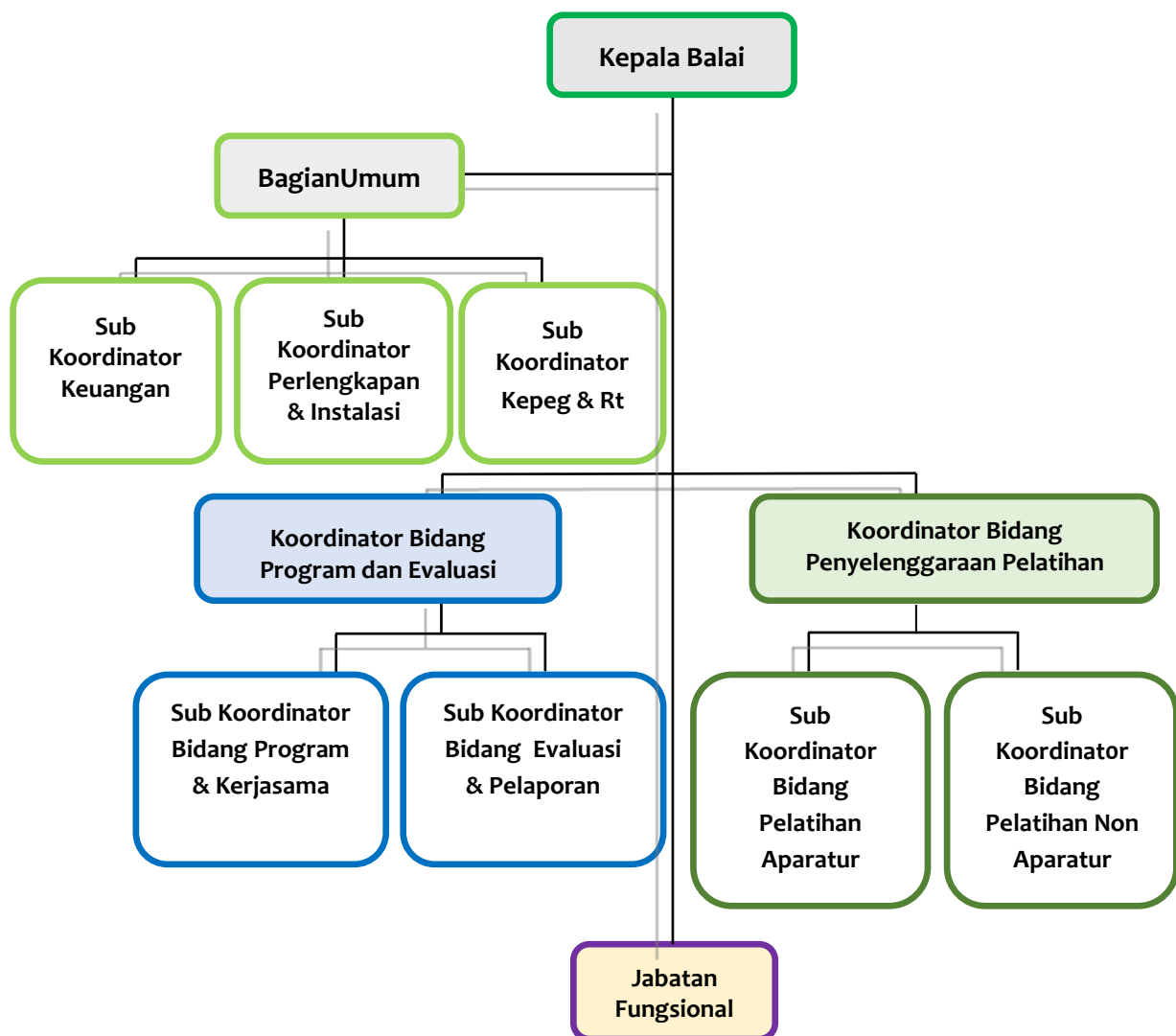
- Melaksanakan tatap muka pelatihan beserta presentase SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan.
- Melaksanakan tatap muka pelatihan beserta tingkat kepuasan peserta terhadap Widyaiswara/Fasilitator pelatihan.

b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN



- Melaksanakan kegiatan layanan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- c. Arsiparis
 - Melaksanakan penataan arsip layanan balai.
- d. Pranata Komputer
 - Memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pengelola Perpustakaan
 - Melakukan laporan layanan administrasi pada instalasi perpustakaan.

a. Struktur Organisasi



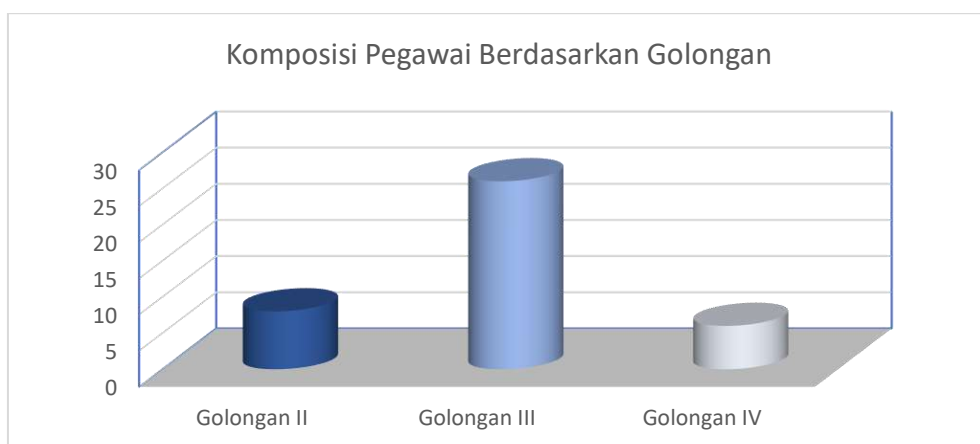
Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang



b. Sumber Daya Manusia BBPP Binuang

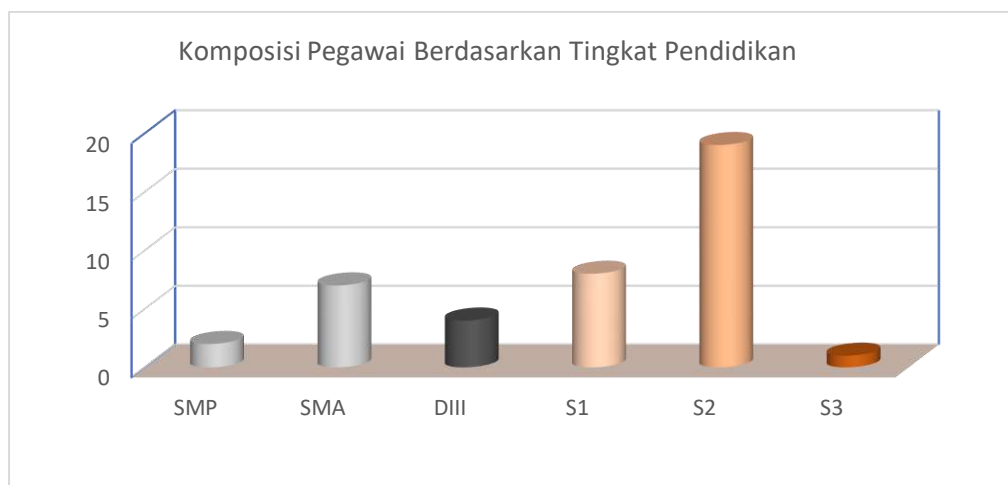
Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Binuang didukung oleh 40 karyawan, dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang aparat serta 1 orang aparat berstatus PPPK (data per 31 Desember 2023), yang terdiri atas 27 Aparat laki-laki dan 14 Perempuan. Komposisi pegawai BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci sebagai berikut:

- a. Golongan, terdiri atas: golongan II sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 26 orang. Golongan IV sebanyak 6 orang dan PPPK golongan IX 1 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Per 31 Desember 2023 berdasarkan golongan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan

- b. Tingkat Pendidikan, terdiri atas: S3 (doktoral) sebanyak 1 orang S2 (magister) sebanyak 19 orang, S1 (sarjana) sebanyak 8 orang, D3 (diploma) sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 7 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai BBPP Binnang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

A. Aspek Strategis dan Permasalahan utama (*strategic issued*)

1. Aspek Strategis

a. Sumberdaya Alam

- a) BBPP Binnang berada di lahan yang telah bersertifikat seluas 11,51 Hektar yang dilengkapi dengan fasilitas instalasi lahan praktek, sehingga sangat representative dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian Teknis Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Tata Guna Air, serta kewirausahaan pertanian.
- b) Instalasi lahan praktek yang tersedia seluas 6,5 hektar dilengkapi dengan sistem irigasi semi teknis yang mengalir sepanjang tahun sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan praktek budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman musiman.
- c) Secara demografi BBPP Binnang sangat strategis, mudah diakses melalui transportasi darat dan laut yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dimana Kalimantan Selatan menjadi pintu masuk untuk semua provinsi di Kalimantan, serta Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru.

b. Sumberdaya Kelembagaan

a) Organisasi dan Tata Kerja

BBPP Binnang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja Dipimpin oleh seorang Kepala Balai terdiri dari :



Kepala Bagian Umum membawahi :

- Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga
- Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi
- Sub Koordinator Keuangan

Koordinator Bidang Program membawahi :

- Sub Koordinator Program dan Kerjasama
- Sub Koordinator Evaluasi dan Laporan

Koordinator Bidang Penyelenggaraan membawahi :

- Sub Koordinator Aparatur
- Sub Koordinator Non Aparatur

b) Penguatan Kelembagaan Melalui Sertifikasi Integrasi Manajemen Mutu dan Manajemen Lingkungan (ISO 9001:2015, dan ISO 14001:2015)

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), adalah bentuk konsisten manajemen untuk memberikan standard minimal terhadap pelayanan penyelenggaraan pelatihan pertanian di BBPP Binuang secara konsisten, dan sertifikasi ISO 9001:2015 (manajemen mutu) mulai diterapkan dan diperoleh sertifikasinya sejak tahun 2007. Pada akhir tahun 2016 BBPP Binuang telah mengintegrasikan sistem pelayanan tersebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan, (Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 14001:2015) secara berkelanjutan.

Hasil audit merekomendasikan BBPP Binuang meraih sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, maka secara optimal dengan sumber daya yang tersedia untuk :

- Berkomitmen dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan.
- Berperan aktif dalam usaha pelestarian dan perbaikan alam.
- Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Senantiasa memenuhi sasaran mutu dan lingkungan serta persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen integrasi (ISO 9001-2015 dan ISO 14001-2015) secara berkelanjutan.



- Mengkomunikasikan system manajemen integrase ini kepada seluruh personil BBPP Binnuang serta pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Lembaga Pelatihan Profesi

Sejak tahun 2013 BBPP Binnuang mendapat mandat dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pemerintah, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menyelenggarakan pelatihan Profesi baik bagi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian maupun non ASN. Pelaksanaan Sertifikasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2013 antara lain : Pelatihan Kompetensi/Profesi yang berkaitan dengan Vokasi Produksi Benih Tanaman Padi, Vokasi Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Vokasi Alsintan, Vokasi Mandor Kebun Kelapa Sawit, Vokasi Fasilitator Pertanian Organik dan lain-lain.

d) Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sebagai Lembaga Pelatihan Profesi BBPP Binnuang telah dapat penugasan untuk melaksanakan mandat Uji Kompetensi khusus bagi pejabat RIHP Penyuluhan Pertanian (Pertanian), yang dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai sekarang.

e) Penumbuhan dan pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Tujuannya adalah pemberian pelayanan sekaligus penyediaan tempat pelatihan/magang pertanian bagi pelaku utama (non apartur) yang tidak mungkin diberikan pelayanan pelatihan/magang secara langsung di BBPP Binnuang, yang tersebar di perdesaan wilayah kerja BBPP Binnuang, dan sejak tahun 2006 BBPP Binnuang sampai saat sekarang telah membina dan mengklasifikasi sebanyak 152 (seratus empat puluh tiga) unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar di wilayah kerja 5 (lima) Provinsi se- Kalimantan, dengan klasifikasi masing-masingnya sbb:

Tabel 1. Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S Tahun 2023

No	Provinsi	Utama	Madya	Pemula	Jumlah
1	Kalimantan Selatan	0	8	29	37
2	Kalimantan Tengah	2	9	29	40
3	Kalimantan Timur	0	21	17	38
4	Kalimantan Barat	4	5	18	27



No	Provinsi	Utama	Madya	Pemula	Jumlah
5	Kalimantan Utara	0	8	8	16
	Total	6	51	101	158

Di Triwulan IV Tahun 2023 terdapat penetapan penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S berupa sarana dan prasarana dengan target 8 lembaga dan realisasi 8 lembaga (100 %), dalam rangka penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat pembelajaran petani dan untuk menunjang tugas dan fungsi P4S maka dipandang perlu untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi P4S. Penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S berupa proyektor, kursi kuliah, speaker wearless, meja rapat, dan lemari buku.

f) Inkubator Agribisnis sebagai Unit Pembelajaran Usaha

Inkubator Agribisnis merupakan bentuk lembaga yang dibentuk dan memiliki fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kewirausahaan stakeholders. Peranan inkubator bisnis sangat strategis sebagai unit yang fokus dalam meningkatkan atmosfer kewirausahaan di lingkungan stakeholders pertanian.

BBPP Binnang memiliki Inkubator Agribisnis (IA) BBPP Binnang, di mana tujuan pengembangan pusat inkubator agribisnis adalah:

- Menginkubasi para tenant sehingga mampu : (1). Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; (2). Menerapkan pola manajemen usaha agribisnis; (3). Menerapkan kaidah kaidah bisnis dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatan.
- Membantu mempercepat tumbuhnya pelaku usaha agribisnis yang andal dan mandiri.
- Membuka peluang lapangan kerja di bidang agribisnis sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

IA BBPP Binnang sebagai wadah dalam bentuk divisi guna proses penyehatan (inkubasi) dan konsultasi bagi tenant sehingga menjadi pelaku usaha agribisnis yang mandiri dan andal berdasarkan kaidah bisnis yang bertanggung jawab



dengan membangun budaya bisnis dan kebersamaan yang kuat, dalam mengelola sumberdaya secara optimal.

g) Sumberdaya Manusia

BBPP Binuang didukung oleh 40 karyawan, dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang aparat serta 1 orang aparat berstatus PPPK (data per 31 Desember 2023), yang terdiri atas 27 Aparat laki-laki dan 14 Perempuan. Selain itu didukung 21 Tenaga Harian Lepas (THL) dengan kontrak kerja per tahun.

h) Sumberdaya Teknologi

BBPP Binuang memiliki ketersediaan alat mesin pertanian yang cukup memadai, mulai dari peralatan pra panen, pengolahan lahan, budidaya tanaman, panen, Pasca Panen, dan sampai kepada pengolahan hasil pertanian, sehingga BBPP Binuang mampu melaksanakan pelatihan pertanian dari hulu sampai hilir. Disamping itu, sarana prasarana yang dimiliki berupa bengkel alsintan dengan petugas teknisi alsintan untuk mengembangkan berbagai alat dan mesin yang tersedia, dapat memberikan peluang pengembangan kreatifitas pertanian, baik melalui modifikasi peralatan yang telah ada, maupun merancang peralatan baru yang tepat guna dan dibutuhkan oleh petani dengan biaya murah. Pengolahan Limbah Pertanian dan pembuatan pupuk kompos dan cair dari Kotoran ternak itik.

Pendukung fasilitas lainnya, juga diperkuat dengan tersedianya Perpustakaan dan fasilitas Informasi Teknologi melalui Web Site BBPP Binuang, perpustakaan on line, yang ditunjang dengan jaringan Wifi 24 jam.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, meliputi: gedung kantor, aula utama beserta ruang kelas, *quest house*, asrama peserta, ruang makan, poliklinik, agri café mart, inkubator agribisnis, jalan kompleks, lahan praktek, saluran irigasi, gedung perpustakaan, musholla, sarana olah raga, lapangan parkir, green house, unit pengolahan pupuk organik, alat dan mesin pertanian, laboratorium penyuluhan, alat pengolahan hasil pertanian, kendaraan



dinas serta operasional balai, laboratorium pengolahan hasil pertanian dan lain-lain.

1) Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian adalah sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

- a) Sebagai UPT BBPP Binuang tidak memiliki kewenangan dalam pengembangan kelembagaan, sehingga sangat sulit untuk mengikuti pola-pola pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tuntutan dunia kerja industri pertanian.
- b) Belum seluruh instalasi yang ada dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan praktek peserta pelatihan, dalam mendukung optimalnya pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- c) Sebaran keberadaan P4S belum merata, sehingga ada beberapa Kabupaten di Provinsi se- Kalimantan (wilayah kerja) masih ada yang belum ada P4S nya, demikian pula dalam tingkat kemampuan pengelola P4S, masih banyak didominasi klasifikasi Pemula.
- d) Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan sarana prasana Pelatihan
- e) Belum optimalnya peran dan fungsi Inkubator Usahatani dalam mendukung penumbuhan usaha kecil pertanian dan pelatihan berbasis kewirausahaan pertanian
- f) Mandat LDP dan TUK masih fokus pada beberapa bidang keahlian atau vokasi, belum mengarah sepenuhnya ke kompetensi (SSKNI) RIHP lainnya.

b. Aspek Ketenagaan

- a) Terbatasnya kuantitas tenaga kepelatihan
- b) Masih kurangnya motivasi untuk pengembangan diri Tenaga fungsional khususnya widyaiswara (kajiwidya, karya tulis ilmiah, modul, jurnal, short course dll)
- c) Belum proposionalnya penempatan tenaga pelatihan berdasarkan beban kerja dan kompetensi masing-masing petugas.



c. Aspek penyelenggaraan

- a) Standar mutu pelayanan Pelatihan telah menggunakan Sistem manajemen Mutu SMM ISO 9001 : 2015, dengan menggunakan instrumen SOP sebagai acuan instruksi kerja pelayanan, tetapi dalam implementasinya belum secara optimal dilaksanakan dan terkoreksi sebagai tindak lanjut perbaikannya, sehingga belum adanya revisi SOP untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- b) Belum jelasnya penjenjangan pelatihan (dasar, menengah dan lanjutan), sesuai Permentan No. 49 Tahun 2011 untuk pelatihan teknis maupun kewirausahaan
- c) Belum optimalnya peran dan fungsi P4S dalam pelayanan peningkatan SDM Petani sekitar melalui penyelenggaraan permagangan/pelatihan.

d. Aspek Kerjasama

- a) Belum adanya regulasi terhadap pengelolaan biaya/anggaran kerjasama sebagai dasar pengenaan tarif kerjasama baik Pelatihan maupun kegiatan pemanfaatan fasilitas kepelatihan.
- b) Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

e. Aspek Pembiayaan

- a) Pembiayaan belum sepenuhnya mengakoodir pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi balai.
- b) Terbatasnya pembiayaan belanja mengikat (rutin) dalam menangani kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari perkantoran.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang saat ini berkembang dan kemungkinan besar dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mempengaruhi perkembangan pelaksanaan tugas BBPP Binuang dalam aspek penyelenggaraan pelatihan dan dukungannya terhadap pengembangan pembangunan pertanian yaitu: pertanian ramah lingkungan, penganeekaragaman produk pertanian, dan pertanian modern adalah :

1. Inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan negara-bangsa telah dimunculkan dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Program Food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Dengan program food estate diharapkan didapat kecukupan produksi/swasembada



melalui komoditi prioritas, yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam serta pertanian terintegrasi.

2. Isu perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui Perjanjian Perjanjian Paris oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim.

Dorongan positif juga berasal dari sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, termasuk juga rekayasa teknologi di sektor pertanian.

3. Gerakan Tanam Pro Organik (Genta Organik) saat ini menjadi fokus utama BPPSDMP Kementerian Pertanian (Kementan), dalam memengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian di Indonesia melalui ketersediaan dan kecukupan pupuk serta mendorong para petani menggunakan pupuk organik dan hayati secara mandiri dan masif.
4. Smart Farming yang merupakan metode dalam upaya memajukan bisnis pertanian inovatif Berbasis Internet of Things (IoT). Dengan konsep smart farming ini memudahkan pelaku pertanian dalam mengecek suhu, fertilizier, pengairan dan pemupukan. Dalam upaya mencapai hal tersebut juga perlu diadakan sebuah kolaborasi antara teknologi dan SDM pertanian yang mampu memanfaatkan *artificial intelligence* (teknologi mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia).



5. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor, seperti pertanian, peternakan dan sektor lain (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan serta meningkatkan penghasil rumah tangga pelaku pertanian.
6. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh petugas fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi para petani dan pelaku usaha agribisnis.
7. Pelatihan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk melakukan praktek karena terbatasnya prasarana dan sarana pelatihan.
8. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur atau Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan bagi non aparatur belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi aparatur maupun non aparatur yang berlatih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja khususnya di kawasan Asia Tenggara.
9. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pertanian aparatur maupun non aparatur dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan pelatihan vokasi pertanian, meliputi vokasi fasilitator pertanian organik, vokasi penangkar benih, vokasi sayuran organik dan vokasi yang lain yang mendukung keterampilan petani dalam mengelola usahatani.

Berdasarkan Isu strategis tersebut di atas, pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023 akan lebih banyak diarahkan pada pelatihan Sistem pertanian terpadu, Gerakan Tanam Pro Organik (Genta Organik) serta Smart Farming dan pelatihan lain yang mendukung komoditas strategis serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelatihan seperti ini harus terintegrasi dengan praktek agribisnis yang dilaksanakan di BBPP Binuang secara berkesinambungan baik yang menghasilkan produk segar maupun hasil olahan. Prasarana dan sarana pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan sistem pertanian terpadu haruslah ditingkatkan jumlah dan mutunya.



Dalam perancangan pelatihan penetapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) akan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pelatihan baik aparatur maupun non aparatur. SKK harus disusun oleh BBPP dengan melibatkan instansi asal peserta aparatur atau instansi Pembina peserta non aparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka peningkatan daya saing purnawidya pelatihan diperlukan SDM Pertanian kepelatihan yang kompeten. Widyaiswara sebagai motor penggerak dalam proses pelatihan serta tenaga kepelatihan balai haruslah terlatih dan tersertifikasi sesuai spesialisasinya. Tenaga kepelatihan yang sangat menentukan mutu penyelenggaraan pelatihan perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan sesuai standar *Management of Training* (MOT) maupun *Training Officer Course* (TOC).

Dalam penyelenggaraan organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terdapat lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.

1. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strengths*) yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :
 - a. BBPP Binuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
 - b. BBPP Binuang memiliki sarana pelatihan berupa empat unit asrama full-AC dengan kapasitas tampung 120 orang, serta tiga ruang kelas belajar dan satu aula (full-AC).
 - c. BBPP Binuang menyelenggarakan pelatihan dengan metode pendekatan Experiential Learning Cycle (ELC) atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan) dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa/ Andragogy yang bersifat pembaharuan.
 - d. Tersedianya pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.



- e. Sistem manajemen BBPP Binuang telah tertata dengan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP).
- f. Widyaiswara yang ada di BBPP Binuang telah mengikuti pelatihan metodologi pelatihan dan pelatihan teknis sesuai spesialisasinya.
- g. Sejak tahun 2012 BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Tahun 2023 ini BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2015 sudah diperbaharui.
- 2. Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan kegiatan saat ini meliputi :
 - a. Sarana praktek untuk kegiatan pelatihan belum lengkap dan memadai.
 - b. Kompetensi pejabat struktural dan staf pelaksana belum sesuai standar.
 - c. Jumlah Widyaiswara belum memenuhi standar kebutuhan dan distribusi spesialisasinya tidak merata.
 - d. Kompetensi Widyaiswara belum tersertifikasi.
 - e. Kurikulum dan metodologi pelatihan belum mantap.
 - f. SOP belum diimplementasikan dengan baik.
 - g. Perubahan atau revisi SOP tidak dilaksanakan walaupun nomenklatur kinerja sudah berubah.
 - h. Budaya Kerja (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin) belum sepenuhnya diterapkan oleh pejabat dan staf pelaksana.
 - i. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelatihan belum prima.
- 3. Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu peluang (*opportunities*) dalam kegiatan yaitu:
 - a. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binuang.
 - b. Kepercayaan pengguna jasa pelatihan terhadap kompetensi BBPP Binuang dalam melaksanakan pelatihan.
 - c. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah kerja untuk pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan BBPP Binuang.
 - d. Terdapat Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binuang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non aparatur.



4. Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif yaitu tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a. Besarnya biaya transportasi peserta khususnya yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri pelatihan di BBPP Binuang.
 - b. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian yang semakin tinggi terhadap mutu pelatihan.
 - c. Sulitnya memperoleh tambahan tenaga kepelatihan khususnya Widyaiswara yang berkualitas tinggi, baik melalui detasering pegawai maupun rekrutmen tenaga baru.

BBPP Binuang sebagai lembaga Pelatihan, untuk menghasilkan SDM pertanian yang kompeten dan berkarakter, maka perlunya standarisasi lembaga, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 2/Permentan/SM.300/J/01/12 tanggal 9 Januari 2012, yang pada gilirannya mampu bersaing dengan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan dikenal di tingkat internasional. Dan agar para penyelenggaranya (Widyaiswara dan tenaga kepelatihan lainnya) menjadi pengelola pelatihan yang berdaya saing dan bertaraf internasional, maka dibutuhkan Widyaiswara yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, kompetensi yang harus dimiliki oleh Widyaiswara meliputi: (i) kompetensi pengelolaan pembelajaran; (ii) kompetensi kepribadian; (iii) kompetensi sosial; dan (iv) kompetensi substantive.

Sedangkan penetapan spesialisasi Widyaiswara mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Standardisasi Tenaga Kepelatihan Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/J/12/11, dengan kekhasan pertanian diwajibkan memiliki 8 jenis spesialisasi yaitu : (i) Budidaya Tanaman; (ii) Pengelolaan Limbah Tanaman; (iii) Hama dan Penyakit Tanaman; (iv) Konservasi Lahan dan Klimatologi; (v) Mekanisasi Pertanian; (vi) Pasca Panen dan Teknologi Hasil Pertanian; (vii) Sosial Ekonomi Pertanian; dan (viii) Penyuluhan Pertanian. Sampai saat ini Widyaiswara dan tenaga kepelatihan yang ada di BBPP Binuang sepenuhnya belum didukung oleh Widyaiswara dengan spesialisasi yang diperlukan.

Isu Otonomi Daerah masih perlu menjadi pertimbangan, bahwa otonomi daerah adalah otoritas yang dimiliki daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam



menetapkan kebijakan dan arah pembangunan didaerahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyatnya, demikian pula terhadap pembangunan sector pertanian, bahwa hampir setiap Kabupaten/kota memiliki program sendiri dalam rencana pembangunannya.

Tugas kita adalah mensinkronkan (linkage) program antara program pembangunan pertanian nasional dengan program yang diusung oleh masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan fokus wilayah berbasis program pembangunan pusat dan daerah.

D. Dukungan Anggaran

Untuk mendukung misi, tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, anggaran yang terdapat pada revisi pagu APBN BBPP Binuang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.514.307.000 dengan rincian sebagai berikut :

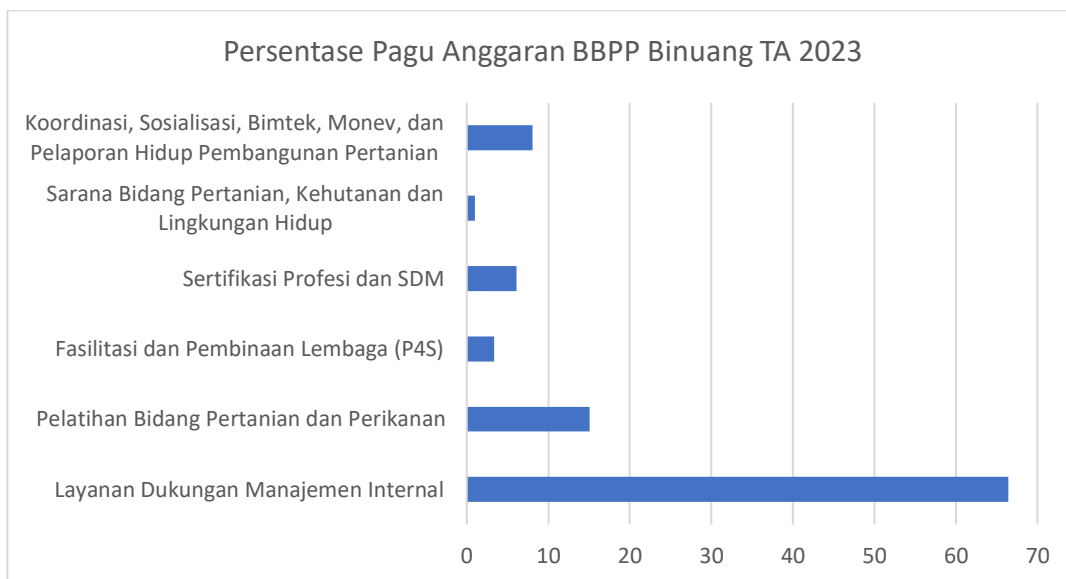
Tabel 2. Anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian	PAGU (dalam Rupiah)	Persentase
1	AEA - Koordinasi Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	686.912.000	8,07
2	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sarana Pelatihan Pertanian	86.000.000	1,01
3	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM Sertifikasi Profesi dan SDM	517.518.000	6,08
4	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penumbuhan dan Penguatan P4S	283.608.000	3,33
5	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	1.285.786.000	15,10
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	5.654.483.000	66,41
	Total	8.514.307.000	100 %



Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase pagu anggaran BBPP Binuang adalah pada kegiatan Layanan Perkantoran UPT Pelatihan yaitu Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan 8,07 %, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1,01 %, Sertifikasi Profesi dan SDM 6,08 % Fasilitas dan Pembinaan Lembaga 3,33 %, Bidang Pertanian dan Perikanan 15,10 %, Layanan Dukungan Manajemen Internal 66,41 %.

Persentase pagu anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023 pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Pagu Anggaran BBPP Binuang

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2023 berjalan total pagu setelah revisi anggaran menjadi sebesar Rp 8.514.307.000, dari yang semula Rp 11.488.801.000 di bulan Januari untuk Tahun 2023.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BBPP Binuang tahun 2020–2024 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis tahun 2020–2024, program kegiatan dan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka mengembangkan tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengembangkan teknik, pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang menetapkan visi 2020 - 2024 dengan mengacu kepada visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka visi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP) adalah: *“Menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing” mendukung Job Creator dan Job Seeker”*.

2. Misi

Untuk dapat menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelatihan.
- b. Mengembangkan ketenagaan diklat.
- c. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan diklat.
- d. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
- e. Menyiapkan pelatihan berbasis Job Ceator dan Job Seeker.

3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP tujuan yang dicapai oleh BBPP Binuang adalah:

- a. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian;
- b. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan penyiapan pencari kerja sektor pertanian;



- c. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan pekerja bidang pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian
- d. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Penguatan dan Pengembangan Penyuluhan/Pedampingan Petani dan Korperasi Petani

4. Sasaran Strategis

Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang pada tahun 2020–2024 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

- a) Terwujudnya kelembagaan BBPP Binuang yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
- b) Terwujudnya 20 unit Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional.
- c) Terwujudnya pendampingan pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
- d) Terwujudnya inkubator Usahatani di BBPP Binuang.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Peningkatan Ketenagaan kediklatan yang profesional dan berkarakter

- a) Meningkatkan kompetensi 13 orang (kumulatif) Widyaiswara BBPP Binuang sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
- b) Sedangkan 2 orang Widyaiswara sedang melakukan tugas belajar Strata 3 /doktoral yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelatihan;
- c) Meningkatnya profesionalisme 50 orang tenaga kediklatan pada BBPP Binuang;
- e) Meningkatnya kompetensi petani, PPL, penyuluh swadaya, serta stakeholder pertanian lain menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.

3. Berkembangnya Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri

- a) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, display, dan lain-lain;



- b) Meningkatnya jejaring kerjasama diklat dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya;
- c) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama diklat dan permagangan pertanian dalam dan luar Negeri dengan pihak terkait.

5. Kebijakan Strategis Tahun 2020-2024

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum Badan PPSDMP dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian, adalah:

1. Penguatan pendidikan vokasi pertanian untuk menghasilkan Job Creator dan Job Seeker.
2. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi pertanian untuk menghasilkan *Job Creator* dan *Job Seeker*
3. Penguatan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
4. Penguatan system manajemen peningkatan kompetensi ASN dan Pekerja bidang pertanian untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDM Pertanian terkait dengan kegiatan Pelatihan Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Pertanian difokuskan pada ***Peningkatan Daya Saing dan Kinerja Pelatihan untuk Mendukung menghasilkan Job Creator dan Job Seeker***, yaitu:

1. Membangun eksistensi dan kemandirian lembaga melalui program berorientasi pasar, pengembangan agribisnis dan optimalisasi sarana prasarana bagi berbagai kegiatan produktif dan bernilai tinggi;
2. Pengembangan Kelembagaan dan Sarana-Prasarana UPT Pelatihan Menuju Badan Layanan Usaha (BLU);
3. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional dan berkarakter;
4. Diklat Berbasis Standar Kompetensi Kerja yang berdaya saing;
5. Pengembangan model dan pola diklat yang berorientasi pasar, bio-industri berkelanjutan, berbasis kawasan, diklat di tempat kerja, berbasis kreatifitas, dan lain-lain;
6. Fasilitasi P4S sebagai lembaga diklat swadaya;



7. Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

B. Strategi

Strategi kebijakan pelatihan pertanian adalah meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Balai Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standarisasi mutu layanan kediklatan;
2. Peningkatan prasarana dan sarana UPT pelatihan pertanian.
3. Pemberdayaan P4S sebagai penyelenggara diklat non-aparatur dan TUK.
4. Peningkatan kapasitas Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan;
5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

6. Program Kegiatan

Program Badan PPSDMP Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian, yang dijabarkan pada Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Puslatan merumuskan kegiatan dan indikator kedalam 4 (empat) pilar yaitu : (i) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (ii) Kelembagaan pelatihan pertanian; (iii) Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; (iv) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan. Balai Besar Pelatihan Pertanian sebagai UPT Pelatihan Pusat mempunyai program yang sama dengan Puslatan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi eselon I .

IKU Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagaimana yang tertuang pada IKU Pusat Pelatihan Pertanian yaitu:

- a. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik.

7. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program Tahun 2023 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :

- a. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
 - Pelatihan Fungsional
 - Pelatihan Bertema Budidaya
 - Pelatihan Bertema Nilai Tambah



- b. Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
 - Pelatihan Subsistem Agribisnis/Agroindustri Hulu (Benih, Pupuk, OPT)
 - Pelatihan Subsistem Budidaya / Usahatani (Smart Farming, Urban Farming)
 - Pelatihan Subsistem Agribisnis/Agroindustri Hilir (Kewirausahaan, Pengolahan Hasil Pertanian)
 - Pelatihan Subsistem Jasa Layanan Pendukung Agribisnis (Operator Alsintan)
- c. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
- d. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga
 - Penumbuhan dan Penguatan P4S
- e. Layanan Dukungan Manajemen Internal, termasuk dukungan teknis lainnya seperti penyelenggaraan kebun praktek.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja dituangkan kedalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSPMP dan Kepala BBPP Binnang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA ditertibkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang ditetapkan dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnang Selanjutnya disebut pihak pertama dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua melakukan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian tersebut (Tabel 3), dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon IIB : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : 2023

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
1	2	3
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,93
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34,00
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang	90,60



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan IV Tahun 2023. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2021 - 2024.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binuang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2023 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100), (3) cukup berhasil (capaian 60-80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indikator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator*.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Triwulan IV Tahun 2023 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja meliputi: Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023, Analisis Nilai Kinerja Anggaran dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja beserta capaian kinerja lainnya. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon IIb : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : 2023

(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional

Indikator Keberhasilan : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (IKSK)

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Permendagri No. 86/2017). Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (*output*) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada BBPP Binuang.

Tabel 4. Capaian Rincian Output (RO) Pelatihan Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi Triwulan IV 2023	Persen
	2023	Satuan		
Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur				
- Pelatihan Fungsional Ahli - Pelatihan Bertema Budidaya - Pelatihan Bertema Nilai Tambah	90	orang	90	100 %
Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur				
- Pelatihan Subsistem Agribisnis/Agroindustri Hulu	700	orang	700	100 %



Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi	Persen
	2023	Satuan	Triwulan IV 2023	
<i>(Benih, Pupuk, OPT)</i> - Pelatihan Subsistem Budidaya / Usahatani <i>(Smart Farming, Urban Farming)</i> - Pelatihan Subsistem Agribisnis/agroindustri Hilir <i>(Kewirausahaan, Pengolahan Hasil Pertanian)</i> - Pelatihan Subsistem Jasa Layanan Pendukung Agribisnis <i>(Operator Alsintan)</i>				
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	150	orang	150	100 %
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Penumbuhan dan Penguatan P4S)	8	lembaga	8	100 %

Berdasarkan Tabel 4 dalam indikator kinerja pengertian aparatur merupakan perangkat alat (negara, pemerintah), para pegawai negeri. Aparatur pemerintah merupakan alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Peserta pelatihan aparatur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Sepanjang Triwulan IV Tahun 2023, telah dilakukan pelatihan bagi aparatur sebanyak 90 dari target 90 orang (100 %).

Sedangkan pelatihan non aparatur adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi profesi, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian di bidang pertanian. Peserta pelatihan non aparatur tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti petani, penyuluh swadaya, serta profesi lain di sektor pertanian yang bukan ASN). Sepanjang Triwulan IV Tahun 2023, telah dilakukan pelatihan bagi non aparatur sebanyak 700 dari target 700 orang (100 %).

Dalam pelatihan tersebut digunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai bentuk penerapatan purnawidya setelah selesai pelatihan dengan mengirimkan eviden berupa foto kegiatan pertanian yang berkaitan dengan penerapan materi pelatihan.



Rumus capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Nilai $\{(\Sigma \text{ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan}) : (\Sigma \text{ Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian, dengan dana DIPA}) \times 100\%\}$

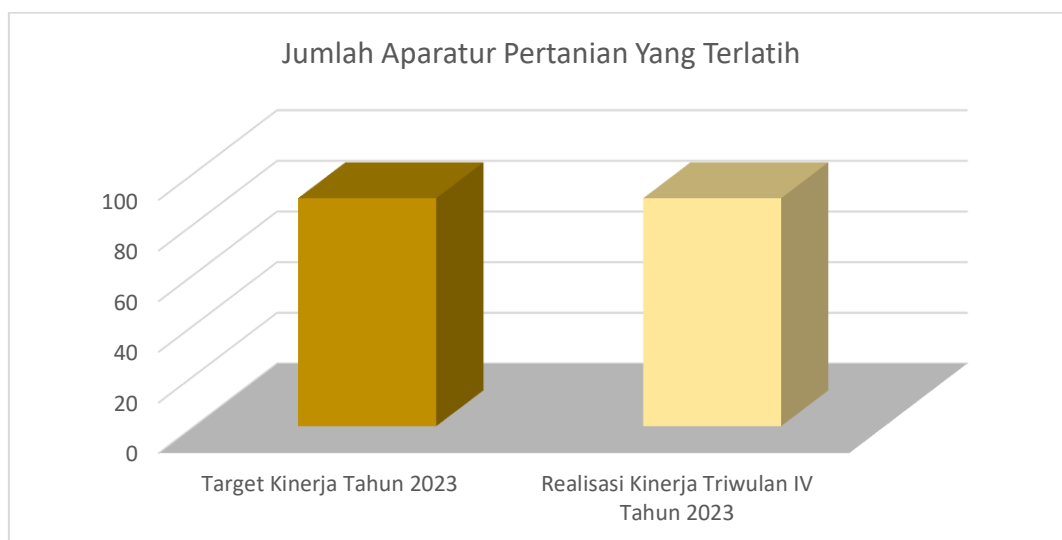
Persentase SDM pertanian yang menerapkan :

$$\frac{718 \times 100}{790} = 90,89 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPP Binnang, Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan sistem aplikasi elektronik Penilaian Indikator Kinerja (e-PIK) sebesar 90,77 % dari target 84,50 % (Lampiran 01).

a. Jumlah pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur

Target kinerja BBPP Binnang Triwulan IV Tahun 2023 untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang terlatih adalah 90 orang dengan rincian target. Untuk Triwulan IV Tahun 2023 realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparatur tahun sebesar 90 orang (100 %). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binnang Triwulan IV Tahun 2023 untuk indikator jumlah aparatur pertanian yang terlatih :



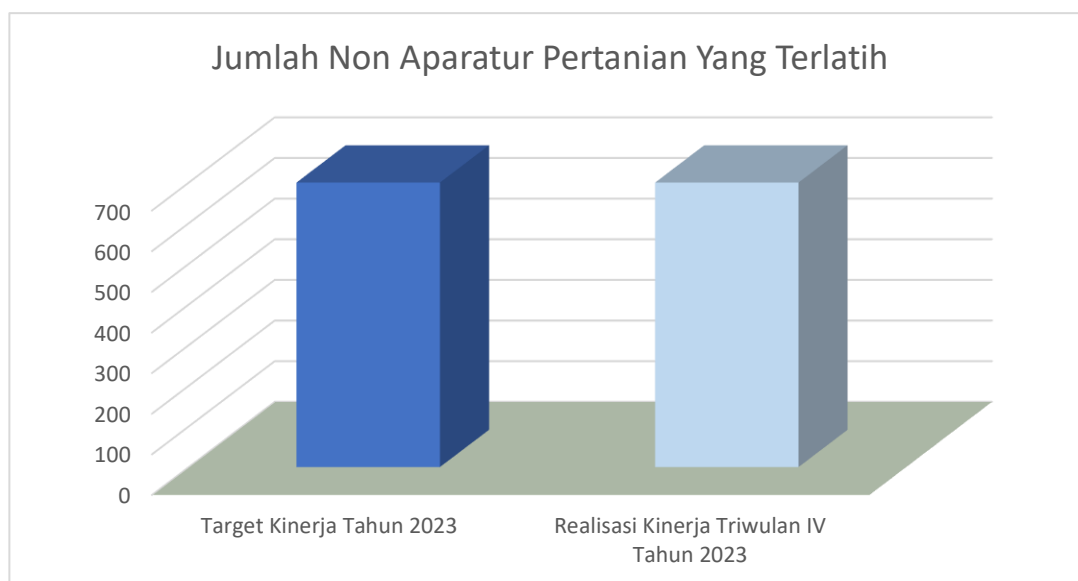
Gambar 5. Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binnang 2023. Persentase jumlah aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 100 % sampai dengan akhir periode Tahun 2023.



b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur

Target kinerja BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023 untuk indikator kinerja jumlah non aparatur pertanian yang terlatih adalah 700 orang, dengan realisasi sebesar 700 orang. Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023 untuk indikator jumlah non aparatur pertanian yang terlatih:



Gambar 6. Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar 6 menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023. Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 100 %.

c. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pertanian yang independen, profesional dan objektif pada profesi pertanian sebanyak 150 orang, dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 150 orang atau sebesar 100 %. Kegiatan sertifikasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga para lulusan pelatihan akan dapat langsung terserap dengan baik.

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

BBPP Binuang dalam mendukung program penumbuhan 2,5 juta pengusaha petani milenial terus melakukan pembinaan dan penumbuhkembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerjanya di



Kalimantan. P4S sebagai pusat pembelajaran bagi petani harus mampu terus menerus berkreaitivitas untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian BBPP Binuang mewakili BPPSDMP Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan Sarpras dan P4S. Sedangkan untuk bantuan kelembagaan sudah mencapai 8 lembaga (100 %), dengan hibah berupa laptop, proyektor, layar proyektor, kamera, printer, whiteboard dll untuk bantuan operasional P4S.

Selain hal tersebut di atas dalam dalam rangka studi banding dan menggali potensi P4S, dilakukan kunjungan ke P4S di Jawa Tengah dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kunjungan ke Dinas Pertanian Kab. Purbalingga Jawa Tengah, dalam rangka studi banding dan menggali potensi P4S. P4S di Kab. Purbalingga memiliki potensi untuk produksi pupuk dan pestisida organik, budidaya organik tanaman pangan dan buah buahan, serta pertanian integrasi terpadu (minapadi, padi-itik) pelatihan di bidang SDM berupa Kelembagaan Ekonomi Petani dan Kewirausahaan.

Adapun yang bisa dijadikan role model inovasi P4S antara lain terdapat P4S yang mampu memberdayakan penduduk sekitar, di mana rumah penduduk diberdayakan selayak guest house back to the nature bagi tamu yang berkunjung atau melakukan pelatihan di P4S tersebut.

- Kunjungan ke P4S Sirnabaya Farm di Kab. Purbalingga, di mana P4S tersebut memiliki program inovasi berupa 1 desa, 1 produk organik. Kegiatan produksi P4S tersebut berupa pupuk organik hayati dan pestisida organik, dengan komoditas andalan padi organik, buah buahan serta pertanian hidroponik. Sedangkan dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian, P4S tersebut dapat melakukan pelatihan bertema Kelembagaan Ekonomi Petani dan Kewirausahaan.
- Kunjungan ke P4S Saka Tani, Desa Penarukan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam mendukung inovasi di bidang budidaya, P4S Saka Tani telah melakukan diversifikasi tanaman dengan melakukan budidaya tanaman vanili secara organik dan mandiri menggunakan pupuk organik produksi sendiri. Selaras dengan program gerakan pertanian pro organik, sepanjang Tahun 2023 P4S Saka Tani sudah memproduksi sebanyak 8,5 ton pupuk organik dan 100 liter agensi hayati untuk keperluan petani disekitarnya.



(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian
Indikator Keberhasilan : Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh



Keputusan Menteri Pendayaaunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif Pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan 252 responden yang diperoleh dari 9 indikator unsur pelayanan, dengan nilai rata-rata sebagai berikut :



Tabel 5. Pengolahan Data Kuisisioner IKM BBPP Binuang

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	990	983	990	1001	975	990	991	991	1001
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.93	3.90	3.93	3.97	3.87	3.93	3.93	3.93	3.97
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.44	0.43	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	98,23	3,93							
Mutu Pelayanan	A	Sangat Baik							

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 : Kompetensi Pelaksana
- U7 : Perilaku Pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
- U9 : Sarana Dan Prasarana

Dari data tersebut terlihat bahwa dengan nilai SKM 98,23 atau 3,93 skala likert, disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan A atau kinerja unit pelayanan adalah Sangat Baik.

Selain itu berdasarkan Nilai Rata Rata/NRR Tabel 3, unsur Sarana Dan Prasarana (3,97) merupakan unsur dengan nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan (3,90) dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,87). Secara keseluruhan nilai SKM 3,93 termasuk kategori A (*pelayanan sangat baik*).

(C) Reformasi Reformasi Birokrasi BBPP Binuang Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Layanan Pada Prima
Indikator Keberhasilan : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap



sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

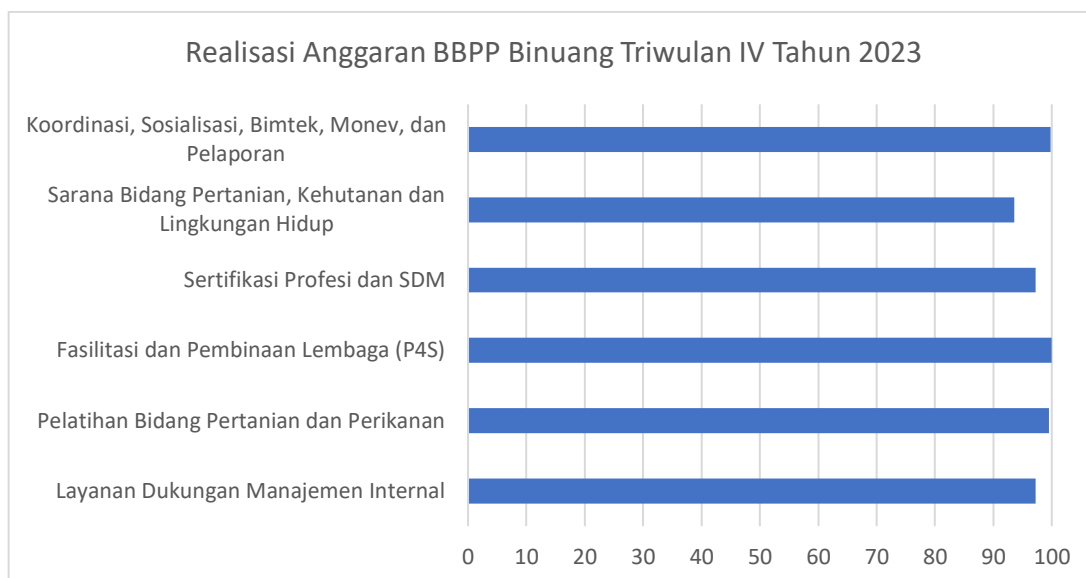
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk Triwulan IV Tahun 2023 realisasi capaian yang dihitung sebesar 33,5 atau sebesar 100%.

**(D) Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Binuang****Indikator Keberhasilan : Nilai Kinerja Anggaran****a. Realisasi Anggaran**

Tabel 6. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	AEA - Koordinasi Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	686.912.000	685.275.031	99,76 %
2	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sarana Pelatihan Pertanian	86.000.000	80.500.000	93,60 %
3	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	517.518.000	502.995.040	97,19 %
4	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penumbuhan dan Penguatan P4S	283.608.000	283.588.365	99,99 %
5	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	1.285.786.000	1.279.148.593	99,48 %
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	5.654.483.000	5.498.621.659	97,24 %
	Jumlah	8.514.307.000	8.330.128.688	97,84 %

Berdasarkan alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2023, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja setelah revisi adalah Rp 8.514.307.000. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.330.128.688 atau telah mencapai 97,84 %.



Gambar 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023 (dalam persentase)

b. Analisis Nilai Kinerja Anggaran BBPP

Salah satu nilai kinerja Lembaga/Kementerian negara, termasuk UPT BBPP Binuang diukur dari bagaimana mengelola keuangan negara. Terdapat empat instrumen yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu variabel capaian keluaran, realisasi anggaran, efisiensi, dan konsistensi rencana penarikan dana. Tiga variable merupakan variable independent, sementara satu variable, yaitu efisiensi, merupakan variable terikat, yaitu variable efisiensi. Efisiensi terikat dengan nilai realisasi anggaran dan nilai capaian keluaran. Sebagai instrument penilaian kinerja, berbagai alat ukur tersebut harus memenuhi kriteria alat ukur yang konsisten dan relevan.

Penghitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran. Nilai NKA BBPP Binuang adalah sbb :



Gambar 8. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPP Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi Smart Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai keberhasilan Indikator Kinerja Outcome BBPP Binuang telah mencapai 86,49.

Dari data Smart Kemenkeu tersebut dapat dihitung capaian kinerja sesuai target Perjanjian Kinerja (PK) dengan metode scoring sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capain scoring NKA} &= \text{Realisasi NKA} / \text{Target NKA} \times 100 \\
 &= 86,49 / 90,60 \times 100 \\
 &= 95,46
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan NKA tersebut, capain scoring nilai NKA BBPP Binuang sebesar 95,46 termasuk kategori Berhasil.

C. Capain Perjanjian Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator outcome, capaian kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSPMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, ditetapkan dengan rincian capain Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Binuang TA 2020 - 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi			
			2020	2021	2022	Triwulan IV 2023
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %	18,46 (dari target 20 %)	82,80	91,11	90,89 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi			
			2020	2021	2022	Triwulan IV 2023
pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	<i>(dalam Persen)</i>					
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian <i>(dalam Likert)</i>	3,93	3,86	3,91	3,92	3,93
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi <i>(dalam Likert)</i>	34,00	33,5	33,5	34,00	34,95
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang <i>(dalam Nilai)</i>	84,50	100* (capaian anggaran)	88,08	87,37	95,46

Berdasarkan Tabel 7 BBPP Binuang telah memenuhi semua kriteria perjanjian kinerja dimana semua indikator ; (A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian, (B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, (C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, (D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang, telah memenuhi target PK antara UPT BBPP Binuang dengan Badan PPSDMP Kementan.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain 4 (empat) indikator perjanjian kinerja tersebut, yakni (A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian, (B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, (C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, (D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang, terdapat



Capaian Kinerja Lainnya sepanjang Triwulan IV Tahun 2023. Capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Negara Bukan Pajak

BBPP Binuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNPB. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan melalui Bendahara Penerima. PNPB meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional. Penerimaan Umum meliputi: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang/Modal TA yang lalu.

Sedangkan Pendapatan Fungsional meliputi Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Perkiraan Penerimaan PNPB untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Target penerimaan PNPB dari semula Rp 100.000.000 di awal Tahun 2023 menjadi 241.300.000 dan telah diperoleh sebesar Rp 297.972.000. Capaian kinerja penerimaan PNPB Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Realisasi PNPB BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2023

No		Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penerimaan Fungsional						
1.	Pendapatan penjualan hasil pertanian. perkebunan. peternakan dan budidaya	22.882.500	14.940.000	5.149.500	-	
2.	Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi	31.100.000	12.800.000	36.100.000	33.700.000	
3	Perkiraan penerimaan PNPB untuk penerimaan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	-			141.300.000	
Jumlah			53.982.500	27.740.000	41.249.500	175.000.000
Jumlah Total			Rp 297.972.000			



Realisasi penerimaan PNPB Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 123,49 % dari target atau senilai Rp 297.972.000.

2) Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Merdeka

Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya.

Berikut jenis kegiatan yang tersedia di program Kampus Merdeka, yaitu:

- Magang Bersertifikat
- Studi Independen
- Kampus Mengajar
- Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)
- Pertukaran Mahasiswa Merdeka
- Membangun Desa (KKN Tematik)
- Proyek Kemanusiaan
- Riset atau Penelitian
- Wirausaha

Pengalaman mahasiswa di kegiatan Kampus Merdeka akan berpengaruh besar terhadap kesiapan karir mahasiswa dengan cara memastikan mahasiswa terus menyimak perubahan dunia luar kampus selama berkuliah dan dapat kesempatan untuk menerapkan ilmu kepada masalah di dunia nyata khususnya di sektor Pertanian.

Hal ini senada dengan Tugas & Fungsi dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Badan Penyuluhan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, yaitu mencerdaskan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian. Atas dasar itulah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (Uniska) menjalin kerjasama. Hal ini dilakukan dengan wujud kegiatan



praktek magang di BBPP Binuang Tahun 2023, yang telah berlangsung selama 1 Semester. Sedangkan di Triwulan IV Tahun 2023, terdapat program magang SMK dari SMK Negeri 2 Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yang berlangsung selama 3 bulan.

3) Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2023

Pada Triwulan II Tahun 2023 aplikasi inovasi Biotron (*Biochar Three In One*) yang dihasilkan oleh Widyaiswara BBPP Binuang Budiono, SP MM berhasil masuk Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2023. Dengan berbagai kelebihan inovasi ini diharapkan dapat membantu petani dalam budidaya ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi inovasi "Biochar Three In One" (Biotron) yang dihasilkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan, yang diharapkan dapat membantu petani mengatasi kelangkaan pupuk kimia.

"Biotron jadi bagian kita menghadirkan pupuk organik dan menjadi salah satu upaya kita meningkatkan produksi pangan tanpa ketergantungan dengan pupuk kimia. Temuan atau inovasi lain akan kita dorong, seperti 'smart farming'," kata Prof. Syahrul Yasin Limpo dilansir Antara di Jakarta, Rabu (28/06/23).

Prof. Syahrul Yasin Limpo mengakui, hadirnya Biotron menjadi salah satu pilihan dan mutlak dilakukan di tengah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan pangan pentingnya ketersediaan pangan. Apalagi pangan dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. *"Climate change, degradasi lahan dan El Nino ada depan mata kita. Dengan pendekatan scientific dan teknologi baru menjadi mutlak harus kita lakukan untuk meningkatkan produksi pangan,"* tegasnya.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

- a. Berdasarkan aplikasi Smart Kemenkeu, capaian realiasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 86,49. Pada Closing Desember 2023 tersebut telah memenuhi target sesuai dengan konsistensi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang



diharapkan sebesar 95,46 dari target 90,60. Meski demikian ada beberapa catatan yang perlu diperbaharui antara lain :

- Jadwal pelaksanaan kegiatan diharapkan konsistensinya sehingga berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu realisasi.
 - Terdapat refocusing anggaran sehingga berpengaruh terhadap target capaian.
- b. BBPP Binnuang siap untuk mensupport Kementerian Pertanian dalam menyongsong kegiatan pertanian sepanjang tahun 2023, lewat sejumlah rencana program dan kegiatan. Dalam hal ini Kementan telah menyiapkan dua strategi utama dalam melaksanakan hal ini. Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, landasan yang digunakan Kementan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan tema '*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan*'. Lanjut beliau "*Pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang kita kenal sebagai Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan menjadi beberapa Program Prioritas (PP).*"
- c. BBPP Binnuang terus mengadakan tema pelatihan terupdate dengan perubahan kultur, seperti *smart farming*, *startup* dan *climate change* yang menjadi bukti keinginan kuat Kementan untuk memberikan kepedulian kepada insan pertanian melalui pelatihan sebagai mana arahan Bapak Mentan Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. Menteri Pertanian mendorong gerakan tanam padi pada Food Estate di Kalimantan Tengah guna akselerasi keberlanjutan pengembangan Food Estate lahan rawa sebagai lumbung pangan nasional, terlebih dalam menghadapi kondisi ketidakpastian akibat El Nino. Selain itu sesuai arahan Menteri Pertanian dalam menggenjot pengembangan Food Estate ini tidak hanya menangani onfarm, tapi juga sisi hilir dan pasarnya.
- d. Sesuai arahan BPPSDMP Kementan dalam memberdayakan sektor pertanian beserta *stakeholders* milenial yang terlibat bahwa petani milenial mempunyai peran penting dalam melanjutkan pembangunan disektor pertanian. Melalui program YESS dan DPM/DPA BBPP Binnuang diharapkan mampu menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten



di bidang pertanian yang tangguh dan berkualitas di area kerja Kalimantan pada khususnya. Untuk mencapai produktivitas pertanian yang tinggi, hal utama yang paling utama yaitu tersedianya SDM Pertanian yang unggul, andal, profesional, dan mandiri serta berjiwa enterprenur tinggi.

- e. Guna menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah. dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat. maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pertanian wilayah. dan diharapkan akan mendorong dukungan yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adanya share biaya dalam peningkatan SDM di daerah, dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian. sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten/Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya disektor pertanian.
- f. Kami juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan potensi pertanian di daerah masing-masing, termasuk juga kelembagaan P4S. Dengan demikian setiap daerah mampu dan dapat membuat proyeksi kebutuhan pangan dalam jangka menengah panjang demi mengantisipasi tantangan perubahan iklim yang mengancam produksi dan rantai pasok pangan ke depan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BBPP Binuang Tahunan 2023 ini merupakan pelaporan serangkaian kegiatan beserta kinerja BBPP Binuang sebagai UPT Badan PPSDMP Kementan dengan wilayah kerja se-Kalimantan. Dalam rentang periode Januari s.d. Desember Tahun 2023, hasil pengukuran kinerja anggaran BBPP Binuang berdasarkan alokasi pagu TAHUN 2023 adalah Rp 8.514.307.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.330.128.688 atau telah mencapai 97,84 %.

Hasil pengukuran kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Badan PPSDMP Kementan dan BBPP Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut adalah sebagai berikut : (1) Capaian persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebesar 90,89 % dari target 85 %; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik = 3,93 likert dari target 3,93 likert (kategori mutu pelayanan sangat baik) dengan nilai SKM Unit Pelayanan sebesar 98,23 (kategori A = Sangat Baik); (3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMP RB) sebesar 34,95 dari target 34,00; (4) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 95,46 dari target 90,60.

Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya sepanjang Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak PNPB telah mencapai target 123,49 %; (2) Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Merdeka dengan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (Uniska) dan (3) Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2023 melalui inovasi Biotron (*Biochar Three In One*).

Demikian Laporan ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja BBPP Binuang sebagai unit kerja Badan PPSDMP Kementan. Kami berharap laporan kinerja tersebut dapat dipergunakan dengan baik sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386

SITUS : www.bppsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 31 Maret 2023

Pihak Kedua

Dedi Nursyamsi

Pihak Pertama

Bambang Haryanto

Unit Eselon I : Badan PPSDMP Kementan
Unit Eselon IIb : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85%	Persen
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,93	Likert
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34,00	Nilai
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang	90,60	Nilai

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Rp 3.814.493.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 6.107.908.000
	Jumlah	Rp 9.922.401.000

Binuang, 31 Maret 2023

Pihak Kedua



Dedi Nursyamsi

Pihak Pertama



Bambang Haryanto

Lampiran 01. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya

Rekap UPT - Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 2023

Periode : Triwulan IV 2023

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Persentase Peserta Menerapkan
1	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli	14 Februari - 06 Maret 2023	30	28	93.33
2	Pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis	28 Maret - 01 April 2023	30	30	100.00
3	Pelatihan Pertanian Terpadu	28 Maret - 01 April 2023	30	26	86.67
4	Pelatihan Penangkar Benih Padi	08 - 12 Mei 2023	30	27	90.00
5	Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian Swadaya	15-19 Mei 2023	30	26	86.67
6	Pelatihan Pengendalian OPT Tanaman Tanaman	22 - 26 Mei 2023	30	25	83.33
7	Pelatihan Pengolahan Hasil Produk Hortikultura Bagi KWT	22 - 26 Mei 2023	30	30	100.00
8	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan I	07 - 09 Juni 2023	30	18	60.00
9	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan II	07 - 09 Juni 2023	30	23	76.67
10	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan III	07 - 09 Juni 2023	30	20	66.67
11	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan IV	07 - 09 Juni 2023	30	19	63.33
12	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan V	07 - 09 Juni 2023	30	25	83.33
13	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan VI	07 - 09 Juni 2023	30	26	86.67
14	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan VII	07 - 09 Juni 2023	30	30	100.00
15	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan VIII	07 - 09 Juni 2023	30	30	100.00
16	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan IX	07 - 09 Juni 2023	30	30	100.00
17	Pelatihan Smart Farming	21 - 25 Juli 2023	30	25	83.33

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Presentase Peserta Menerapkan
18	Pelatihan Biotron	21 - 25 Agustus 2023	30	30	100.00
19	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan X	12-14 Juni 2023	24	24	100.00
20	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XI	12-14 Juni 2024	27	27	100.00
21	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XII	11-13 Agustus 2023	30	30	100.00
22	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XIII	11-13 Agustus 2023	30	30	100.00
23	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XIV	18-20 Agustus 2023	35	35	100.00
24	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XV	18-20 Agustus 2023	34	34	100.00
25	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XVI	20-22 Agustus 2023	35	35	100.00
26	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan XVII	20-22 Agustus 2023	35	35	100.00
Jumlah			790	718	90.89

Persentase SDM pertanian yang menerapkan :	$\frac{718 \times 100}{790}$	90.89
---	------------------------------	--------------

**Lampiran 02. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBPP Binuang
Periode Desember Tahun 2023**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BBPP BINUANG

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN BULAN DESEMBER 2023																																													
NILAI IKM 98.23	<table border="1"> <tr> <th align="left" colspan="2">NAMA UNIT</th> <th align="left" colspan="2">BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG</th> </tr> <tr> <th align="left" colspan="4">RESPONDEN</th> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>:</td> <td colspan="2">252 Orang</td> </tr> <tr> <td>JENIS KELAMIN</td> <td>:</td> <td>L : 196 Orang</td> <td>P : 56 Orang</td> </tr> <tr> <td>PENDIDIKAN</td> <td>:</td> <td>SD : 23 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>SLTP : 29 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>SLTA : 110 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>DI/DII/DIII : 9 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>SI : 76 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>S2 Keatas : 5 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Periode Survey: 01 Jan 2023 s/d 15 Des. 2023</td> </tr> </table> TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	NAMA UNIT		BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG		RESPONDEN				JUMLAH	:	252 Orang		JENIS KELAMIN	:	L : 196 Orang	P : 56 Orang	PENDIDIKAN	:	SD : 23 Orang			:	SLTP : 29 Orang			:	SLTA : 110 Orang			:	DI/DII/DIII : 9 Orang			:	SI : 76 Orang			:	S2 Keatas : 5 Orang		Periode Survey: 01 Jan 2023 s/d 15 Des. 2023			
NAMA UNIT		BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG																																											
RESPONDEN																																													
JUMLAH	:	252 Orang																																											
JENIS KELAMIN	:	L : 196 Orang	P : 56 Orang																																										
PENDIDIKAN	:	SD : 23 Orang																																											
	:	SLTP : 29 Orang																																											
	:	SLTA : 110 Orang																																											
	:	DI/DII/DIII : 9 Orang																																											
	:	SI : 76 Orang																																											
	:	S2 Keatas : 5 Orang																																											
Periode Survey: 01 Jan 2023 s/d 15 Des. 2023																																													

NILAI IKM UNIT PELAYANAN
 A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00

B (Baik) : 76.61 - 88.30

C (Kurang Baik) : 65 - 76.60

D (Tidak Baik) : 25 - 64.99

**Pengolahan Data Kuisioner IKM BBPP Binuang
Periode Desember Tahun 2023**

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	990	983	990	1001	975	990	991	991	1001
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.93	3.90	3.93	3.97	3.87	3.93	3.93	3.93	3.97
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.44	0.43	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	98,23	3,93							
Mutu Pelayanan	A	Sangat Baik							

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 : Kompetensi Pelaksana
- U7 : Perilaku Pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
- U9 : Sarana Dan Prasarana